

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Dimas Syahputra¹, Arnida Wahyuni Lubis²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

dimasyahputra28@gmail.com, arnidawahyuni@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian diolah dengan SPSS.23 for windows. Analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi sederhana $\hat{Y} = 9.080 + 0,748 x$. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik hasil uji t diperoleh t hitung (7.120) > t table (2.4671) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya adanya pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan,

Abstract

This study aims to determine the effect of the internal control system on the quality of the financial reports of the Social Services Office of North Sumatra Province. The research method uses a quantitative approach. The results of the research were processed using SPSS.23 for windows. The analysis used is simple regression analysis $\hat{Y} = 9.080 + 0.748 x$. Based on the results of the analysis, it can be drawn that the results of the t test are obtained t count (7.120) > t table (2.4671) with a significant value of $0.000 < 0.05$ meaning that there is a significant influence of the Internal Control System on the Quality of Financial Reports at the Social Services Office of North Sumatra Province

Keywords: Internal Control, Quality of Financial Statements,

Pendahuluan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standard akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pemerintah sudah melakukan reformasi tentang pengelolaan keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Yendrawati, 2013)

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara lebih lanjut. Dari berbagai tulisan dan beberapa sumber dari internet Ternyata di dalam laporan keuangan pemerintahan masih banyak disajikan data data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan penyimpangan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Suhaeti et al., n.d.)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan banyak kejanggalan dalam pengelolaan keuangan Negara di berbagai instansi. Temuan tersebut merupakan hasil audit yang digelar badan ini selama semester kedua tahun lalu terhadap pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Umum Milik Negara dan daerah. Potensi kerugian negara tersebut merupakan buntut ketidakpatuhan terhadap perundangundangan dan sistem pengendalian intern (Kontan News 2010).

Berdasarkan data dari BPK permasalahan masih di dominasi tentang lemahnya sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah/pusat. Masih begitu banyak ditemukan ketidakpatuhan karyawan dan manajer dalam hal sistem pengendalian intern yang ada pada perusahaan/pemerintah daerah. Kemudian ditemukan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan, kepatuhan dan ketepatanwaktu (timeliness).

Maka dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di

masing-masing SKPD. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian (Rohman, 2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.. Menurut penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sukmaningrum (2012) mengenai analisis faktor–faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut bahwasanya penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan Sistem pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) keandalan laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara”

Kajian Teori

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2010) dalam Muliani (2011) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut, Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan..

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) bahwasanya sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan yaitu Keandalan pelaporan keuangan, Efektifitas dan efisiensi operasi, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presedian selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota

selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpingnya. (NURWANI, 2018)

Menurut Indra (2011:12) dalam (Herawati, 2014) Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi tentang kondisi laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan entitas. Informasi keuangan meliputi aset, kewajiban dan ekuitas entitas, adapun informasi kinerja keuangan meliputi pendapatan dan beban termasuk juga keuntungan dan kerugian yang timbul diluar kegiatan utama entitas. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan hal ini didukung sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Wiwin 2017)

Kualitas Laporan Keuangan

(Sholohah et al., 2019) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informaii akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penilaian kualitas laporan keuangan dapat melalui feedback hitungan rasio dan Financial Reporting Quality Index (FRQI) dengan berpedoman pada indikator ukuran perusahaan, dinyatakan ketika perusahaan tersebut berada di skala sangat kecil, sangat mudah bagi pengelola atau bahkan auditor untuk menemukan kecurangan, sehingga perusahaan kecil memiliki indeks kualitas laporan keuangan sangat baik, perusahaan yang berada pada skala menengah (yang umumnya belum listing di bursa) yang memang rentan terhadap kualitas

laporan keuangan karena mereka sedang mengejar pada tahap maturity, sehingga banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk kualitas laporan keuangan (Biddle et al., 2009).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Variabel penelitian meliputi dua variable bebas yaitu Sistem Pengendalian Internal (X), dan variable terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Penelitian dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Analisis masing-masing variabel akan dihitung menggunakan bantuan program SPSS 23.0 for window.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.080	4.899		1.854	.074
Sistem Pengendalian Internal	.748	.132	.730	5.656	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Persamaan regresi linier sederhana :

$$Y = a + bX$$

$$\hat{Y} = 9.080 + 0,748 x$$

Persamaan dapat diartikan sebagai berikut : Nilai konstanta variable 9.080 artinya jika variabel Sistem Pengendalian Internal (X) bernilai nol (0), maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan bernilai 9.080 satuan. Nilai Koefisien Regresi Variabel 0.748 artinya

variabel Sistem Pengendalian Internal (X) meningkat sebesar satu satuan, variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0.748 satuan.

Uji Koefesiean Korelasi (R)

Tabel 2. Hasil Uji Koefesien Korelasi (R)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.533	.517	3.102

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan pada tabel outpt spss “Model Summary” diatas, diketahui nilai koefesien korelasi R adalah sebesar 0,730 artinya hubungan variable Sistem Pengendalian Internal (X) dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera. memiliki pengaruh yang kuat

Jika nilai koefesien korelasi R tersebut dikuadratkan yaitu $0.730 \times 0.730 = 0.533$ diperoleh nilai koefesien determinasi. R square (koefesien determinasi) dalam hal ini variasi dari variabel Sistem Pengendalian Internal (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Kualitas Laporan Keuangan (X) yaitu sebesar 53,3%. sedangkan sisanya 52.3% dipengaruhi oleh faktor yang lain.

Uji Koefesien Parsial (Uji t)

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.080	4.899		1.854	.074
	Sistem Pengendalian Internal	.748	.132	.730	5.656	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Hasil Coefficients pada uji t diatas dengan membandingkan t hitung dengan t table sebesar 1.7011 yang diperoleh dari t table dengan $df = n - k$ yang jika dimasukkan angka ke dalam rumus tersebut adalah $30 - 2 = 28$ Berdasarkan hasil uji t untuk variable Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan diperoleh t hitung (5.656) > t table (2.4671) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka berdasarkan hasil uji tersebut Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera. memiliki pengaruh positif.

Kesimpulan

Sistem Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera. dimana pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar thitung (5.656) > t table (2.4671) nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan penelitian maka Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera berpengaruh positif dan dikategorikan baik.

Daftar Pustaka

- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Jurnal STAR – Study & Accounting Research*4, XI(1). www.bpk.go.id
- NURWANI. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 31–38.
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>
- Suhaeti, N., Suhendar, D., & Si, M. (n.d.). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.*

Yendrawati, R. (2013). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING*.

Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does Financial Reporting Quality Relateto Investmentmen Efficiency. *Journal of Accounting & Economics*, 48(2), 112-131.

Winwin Yadiati dkk, *Kualitas laporan keuangan*. Kencana, 2017, h. 11